

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Terpaan krisis ekonomi tidak hanya merusak program-program pembangunan, namun juga merusak tatanan ekonomi masyarakat yang telah terbangun sebagai hasil dari pembangunan yang selama ini dilakukan. Lebih parah lagi, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pantjar Simatupang dan Saktyanu K (2003) pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional

adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Secara umum persentase kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal akan tetapi tren dari penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang di luncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka. Berikut adalah tabel yang menunjukkan penurunan persentase kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2013.

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2009 – 2013

Tahun	Persentase
2009	14,15
2010	13,33
2011	12,49
2012	11,66
2013	11,47

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2013

Kendati Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat banyak disparitas antar Provinsi. Ada Provinsi yang berhasil

menurunkan persentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta pada periode tahun 2013 merupakan yang paling tinggi di bandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu sebesar 15,03 persen. Selanjutnya, ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 14,44 persen, berikutnya Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing 12,73 dan 9,61 persen. Peringkat kelima Banten dengan rata-rata 5,89 persen dan tingkat kemiskinan terendah DKI Jakarta dengan rata-rata 3,72 persen.

Tabel 1.2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa
Tahun 2013

Peringkat	Provinsi	Persentase
1	D.I Yogyakarta	15,03
2	Jawa Tengah	14,44
3	Jawa Timur	12,73
4	Jawa Barat	9,61
5	Banten	5,89
6	DKI Jakarta	3,72

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2013

Masalah kemiskinan merupakan isu strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Hal tersebut terbukti di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Kemiskinan merupakan salah satu dari isu strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah D.I Yogyakarta harus bekerja keras untuk dapat mencapai target dalam hal

pengentasan kemiskinan, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2009 hingga tahun 2013 tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta pada Maret 2009 tercatat mencapai 17,23 persen kemudian menurun menjadi 15,03 persen pada September 2013 atau terjadi penurunan sebesar 2,2 persen dalam empat tahun. Meskipun tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta harus terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Tabel 1.3
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di D.I Yogyakarta
Tahun 2009- 2013

Tahun	Persentase
2009	17,23
2010	16,83
2011	16,14
2012	15,88
2013	15,03

Sumber: BPS D.I Yogyakarta, Dalam Angka Tahun 2013

Sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Kualitas Hidup/Indeks Pembangunan Manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di D.I Yogyakarta selama kurun waktu 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia D.I Yogyakarta tercatat sebesar 77,37 naik dari angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2009 yang sebesar 75,23. Nilai Indeks Pembangunan Manusia D.I Yogyakarta tahun 2013 menduduki peringkat 3 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Tingginya nilai Indeks Pembangunan Manusia D.I Yogyakarta ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Tabel 1.4
Perkembangan dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di D.I Yogyakarta Tahun 2009 – 2013

Tahun	Persentase
2009	75,23
2010	75,77
2011	76,32
2012	76,75
2013	77,37

Sumber: BPS D.I Yogyakarta, Dalam Angka Tahun 2013

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Hadi Sasana (2006) Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah

dalam suatu periode. Semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Dari data tabel 1.5 nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 selama kurun waktu 2009 hingga tahun 2013 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai Produk Domestik Regional Bruto riil tercatat sebesar 20,06 triliyun rupiah kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 24,57 triliyun rupiah sehingga selama periode tersebut secara riil Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta naik sebesar 4,51 triliyun rupiah atau 22,44 persen.

Tabel 1.5
Nilai Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2009-2013

Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah)
2009	20.064.257
2010	21.044.042
2011	22,131,774
2012	23,309,218
2013	24,567,476

Sumber: BPS D.I Yogyakarta, Dalam Angka Tahun 2013

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk. Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat dinegara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa Jumlah Penduduk di D.I Yogyakarta setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 Jumlah Penduduk di D.I Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 3.594.854 jiwa di bandingkan tahun 2009 sebanyak 3.426.637 jiwa.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk di D.I Yogyakarta Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah
2009	3.426.637
2010	3.457.491
2011	3.487.325
2012	3.514.762
2013	3.594.854

Sumber: BPS D.I Yogyakarta, Dalam Angka Tahun 2014

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta. dan penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA (Studi Kasus 5 Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta Periode 2007-2013)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.
3. Bagaimana pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah dilakukan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat dalam bidang teoritis

- a. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau wacana yang dapat bermanfaat bagi

penelitian selanjutnya yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan di D.I Yogyakarta.

- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.

2. Manfaat dalam bidang praktis

- a. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.
- b. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.